



**MANAJEMEN STRATEGIS PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG**

***STRATEGIC WASTE MANAGEMENT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT EFFORTS BY THE ENVIRONMENT AGENCY OF MAGELANG DISTRICT***

Dian Irmawati<sup>1</sup>, Dwi Harsono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 09-11-23

Diperbaiki 06-12-23

Disetujui 21-12-23

Kata Kunci:

Manajemen Strategis,  
Pengelolaan Sampah,  
Pembangunan Berkelanjutan,  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Magelang

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manajemen strategis pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses manajemen strategis yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang optimal akan tetapi masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala ditemukan pada indikator pengamatan lingkungan, implementasi strategi, dan evaluasi strategi antara lain kurangnya sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi pegawai, kurangnya anggaran dana, realisasi anggaran yang belum tepat, pelaksanaan program yang masih menemui kendala, dan target kinerja akhir Renstra yang belum terpenuhi. Rekomendasi penelitian diantaranya meningkatkan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi pegawai, memperbaiki dan menambah sarana prasarana dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan merealisasikan seluruh program secara optimal.

ABSTRACT

Keywords:

Strategic Management,  
Waste Management,  
Sustainable Development,  
Environmental Agency of  
Magelang District

The research design for this study was descriptive qualitative research. The research subjects included several employees of the Environmental Agency of Magelang District, representatives from Non-Governmental Organizations (NGOs) or communities, the head of the Waste Bank, the head of TPS3R (Waste Bank Collection and Recycling Center), members of the scavenger community, and the general public. The research instrument was the researchers themselves. Data sources included both primary and secondary data. Data collection techniques consisted of observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques involved four stages: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity was ensured through triangulation of sources.

The research results indicate that, overall, the strategic management process being carried out by the Environmental Agency of Magelang District is optimal, but there are still inhibiting factors in its execution. Some limitations are found in the environmental observation indicators, strategy implementation, and strategy evaluation, including the lack of human resources, both in terms of quantity and employee competence, insufficient budget allocation, inaccurate budget realization, program implementation facing obstacles, and unmet final performance targets in the Strategic Plan. Research recommendations include increasing human resources in terms of both quantity and employee competence, improving and expanding environmentally friendly waste management infrastructure, and realizing all programs optimally.

## 1. Pendahuluan

Sampah menjadi suatu hal yang tidak akan bisa terpisah dari manusia. Selama manusia ada, maka sampah akan terus diproduksi. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan manusia dapat menimbulkan sampah. Umumnya, sampah telah dianggap menjadi suatu barang yang tidak berguna dan dibuang karena tidak digunakan kembali oleh manusia. Apabila ditarik lebih jauh, alam berdampak besar pada penguraian sampah terutama pada sampah organik. Namun jika dibandingkan dengan volume sampah yang tidak berhenti diproduksi maka tidak berimbang proses penguraiannya. Oleh karena itu, peran serta manusia dalam penanganan dan pengolahan sampah sangat penting. Fenomena timbunan sampah menjadi suatu permasalahan yang harus diperhatikan keberadaannya. Faktor meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan daya konsumsi masyarakat juga meningkat. Sementara itu, pengelolaan sampah di Indonesia belum sepenuhnya disadari oleh semua pihak, sehingga belum dapat berjalan optimal meskipun sudah berlangsung lama (Rahmawati dkk, 2021).

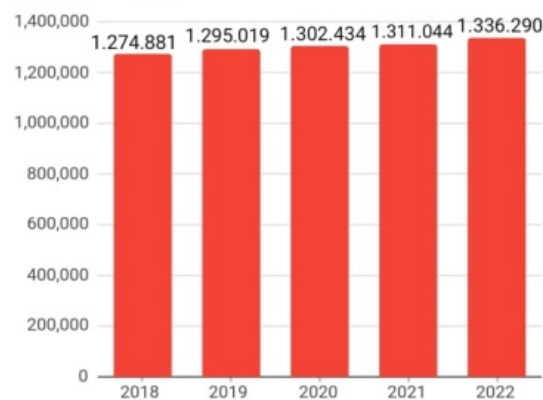
Pengelolaan sampah yang tidak optimal akan mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep pengelolaan sampah berkelanjutan harus diterapkan. Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah harus menggunakan penanganan yang secara aktif berkontribusi pada ekonomi, sosial, dan ekologi sebagaimana yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, namun yang tidak kalah penting yakni berkaitan dengan masalah pengetahuan dalam rangka mendorong perubahan sikap dan pola pikir menuju terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Suryani, 2017).

Seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat, maka konsumsi juga akan meningkat. Kebutuhan yang meningkat dengan tidak disertai wawasan dan pengetahuan tentang sampah, tentunya akan meningkatkan produksi sampah. Salah satu negara yang mengalami peningkatan produksi sampah yaitu Indonesia. Jumlah timbunan sampah tidak sebanding dengan pengurangan sampah yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, (2023), jumlah sampah nasional dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022 sebesar 70 juta ton dengan sampah terkelola sebesar 44,2 juta ton atau sekitar 64,52%. Dengan demikian, sebesar 35,48% sampah belum terkelola. Adapun wilayah dengan penyumbang sampah terbesar di Indonesia yakni provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Pada tahun 2022, jumlah sampah di Jawa Tengah sebesar 4,25 juta ton, disusul oleh DKI Jakarta sebesar 3,11 juta ton, dan Jawa Timur sebesar 1,5 juta ton. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Peraturan mengenai pengelolaan sampah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jakstranas). Dalam Perpres Jakstranas ditegaskan bahwa terdapat strategi

pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah menjadi sebesar 30% dan pengelolaan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pengelolaan sampah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara terintegrasi mulai dari sumber hingga ke tempat pemrosesan akhir. Pedoman pengelolaan sampah daerah tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) yang berisi gambaran target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Magelang menjadi salah satu wilayah yang mengalami permasalahan sampah. Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Magelang berkondisi sangat memprihatinkan dengan kapasitas yang sangat rendah. Produktivitas sampah tidak seimbang dengan ketersediaan pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Bappeda Magelang, setiap tahunnya kabupaten ini memproduksi sampah sekitar 236.135,06 ton yang terdiri dari sampah rumah tangga (sampah dari rumah) dan sampah sejenis rumah tangga (sampah pasar, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi, hotel, restoran, perusahaan, dan lain-lain). Selain itu, masih terjadi gap pengelolaan sampah antara capaian tahun 2019 dengan target tahun 2023 yakni sebesar 68% (433 ton/ hari) sampah belum terkelola. Kabupaten Magelang mempunyai dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni TPA Pasuruhan yang berlokasi di Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan dan TPA Klegen yang berlokasi di Desa Klegen, Kecamatan Grabag. Namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang berkisar 1.363.290 jiwa, kedua TPA tersebut tidak dapat menampung sampah dengan kondisi pengolahan sampah yang belum optimal. Selain itu, penduduk Kabupaten Magelang yang semakin meningkat turut mengakibatkan jumlah sampah sulit terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kabupaten selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan.



Gambar 1. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2018-2022

Adapun selain karena meningkatnya sampah dari sampah rumah tangga, sumber sampah dari fasilitas umum seperti sampah perdagangan, sampah kawasan wisata, dan lain-lain turut menjadi penyumbang sampah terbesar di persampahan di Kabupaten Magelang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari petugas TPA Pasuruhan pada tanggal 18 Januari 2023, bahwa selain sampah rumah tangga,

wilayah dengan penyumbang sampah terbesar di TPA Pasuruhan diantaranya pasar, Akademi Militer (Akmil), dan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Berdasarkan kajian teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, TPA Pasuruhan seharusnya ditutup pada tahun 2017 dikarenakan kondisi yang sudah *overload*. Namun hingga kini, TPA Pasuruhan masih dioperasikan dikarenakan belum adanya lahan pengganti. Ketinggian sampah di TPA Pasuruhan berkisar 32 meter. Tumpukan sampah yang menggunung tersebut mengakibatkan fondasi di TPA rusak dan tidak berfungsi. Hal demikian juga turut membahayakan bagi petugas, pemulung, dan penduduk sekitar apabila sewaktu-waktu terjadi longsor.

Saat ini pengolahan sampah di TPA Pasuruhan menggunakan sistem semi *control landfill* dikarenakan keterbatasan teknologi. Namun pada kenyataannya, masih menggunakan metode *open dumping* akibat keterbatasan lahan. Hal ini tentunya menimbulkan pencemaran baik itu udara maupun air. Kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah sekitar TPA Pasuruhan menjadi terganggu. Sekolah yang mempunyai jarak dengan radius 1-2 km dari TPA menjadi salah satu penerima dampak buruk dari timbunan sampah (Fitriyati, 2021). Dampak tersebut berupa bau busuk yang sangat menyengat hingga mengakibatkan beberapa murid terganggu kesehatannya. Selain itu, saluran air lindi TPA Pasuruhan terhenti dikarenakan tersumbat sampah. Limbah lindi dapat mempengaruhi kesehatan manusia, mencemari lingkungan, dan makhluk hidup perairan karena mengandung berbagai senyawa kimia organik maupun anorganik. Saluran air yang tidak berjalan tentunya menimbulkan pencemaran air sehingga berbahaya bagi masyarakat terdampak dan biota perairan.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang merupakan tugas dan kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Penghargaan Lingkungan Hidup (BPSPLH). Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 pasal 12 ayat 1, disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah yakni penanganan sampah. Sementara itu, Bidang Pengelolaan Sampah dan Penghargaan Lingkungan Hidup (BPSPLH) lebih berfokus terhadap pengurangan sampah. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Penghargaan Lingkungan Hidup (BPSPLH) bertugas melaksanakan tugas operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah serta menyelenggarakan fungsinya seperti penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan menjadi isu strategis yang dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis. Jakstrada. Salah satu misi dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yakni meningkatkan daya saing daerah yang berbasis potensi lokal dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Beberapa program prioritas pembangunan infrastruktur yang merujuk pada pembangunan berkelanjutan tidak terkecuali program untuk pengelolaan sampah. Salah satu program tersebut yakni pengelolaan sistem jaringan persampahan yang

ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menghadapi berbagai permasalahan sehingga menyebabkan kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut kemudian dimasukkan pada isu-isu strategis baik pada dokumen RPJMD, Rencana Strategis, maupun Jakstrada. Permasalahan tersebut peneliti temukan ketika melakukan pra penelitian dari berbagai sumber baik dari media terkait pengelolaan sampah maupun wawancara pada instansi terkait.

Dalam pelaksanaannya, strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang masih mengalami kendala. Dinas Lingkungan Hidup belum dapat mencapai sasaran target kinerja pengelolaan sampah. Target Persentase Pengelolaan Sampah tahun 2022 adalah sebesar 45,00 dengan realisasi sebesar 42,43. Sementara itu, capaian kinerja terhadap 2024 masih rendah yaitu sebesar 77%. Berdasarkan informasi dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, kondisi pandemi COVID-19 turut mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan sampah. Selama Covid-19 banyak Bank sampah yang untuk sementara waktu tidak berani beroperasi sehingga sampah yang dikelola berkurang. Dengan demikian dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan perhatian serius terhadap realisasi dan target kinerja yang telah disusun.

Implementasi strategi harus didukung dengan adanya sumber daya manusia. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang mengalami kendala baik dari segi jumlah maupun kompetensi pegawai. Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang terdiri dari PNS, *supporting staff* (SS), dan Tenaga Harian Lepas (THL). Berikut data pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang

Jenis Pegawai	Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang		
	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
PNS	S2	8	4
	S1	11	4
	D3	4	3
	SMA	23	2
	SMP	30	-
	SD	13	-
THL	SMA	139	-
	SMP	39	
	SD	16	
SS	S1	2	5
	D3	2	3

Sumber: Renstra DLH Kabupaten Magelang, 2023

Berdasarkan data-data pegawai dan peta jabatan, kendala sumber daya manusia dalam mendukung kinerja pengelolaan lingkungan hidup diantaranya terdapat jabatan struktural yang belum terisi, dan sudah memasuki masa hampir pensiun;

masih banyak jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang belum terisi; masih terdapat formasi pegawai yang belum sesuai kualifikasi ijazah dan keahlian; belum dipenuhinya susunan pegawai responsif gender, dimana THL masih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki; dan masih banyak kebutuhan staf yang belum dipenuhi;

Beberapa strategi telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang mengenai pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan, namun dalam implementasinya menemui kendala berupa sarana dan prasarana yang tidak mencukupi. Sejumlah sarana mengalami kerusakan dan jumlah yang tersedia belum dapat mencukupi kebutuhan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang menghasilkan sampah sekitar 500 ton per hari. Selanjutnya yaitu pengelolaan sampah mandiri 3R dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Namun sebagian besar masyarakat masih melakukan praktik membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dan belum terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah, pemanfaatan dan pendaur-ulangan. Salah satu warga sekitar TPA Pasuruhan kemudian melaporkan masalah ini ke Dinas Lingkungan Hidup. Tarsudi, warga Desa Pasuruhan mengungkapkan bahwa sampah yang berserakan tersebut menimbulkan bau tidak sedap karena berdekatan dengan kebun miliknya. (radarsemarang.jawapos.com, 30/3/22).

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah dengan melakukan sosialisasi pembatasan membuang sampah di TPA Pasuruhan di setiap kecamatan dan desa. Pemerintah juga menghimbau agar pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan prinsip 3R. TPS3R yakni tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Pada tahun 2019, Kabupaten Magelang memiliki 667 unit diantaranya terdiri dari bank sampah dan TPS3R. Namun, hingga kini bank sampah dan TPS3R belum dapat mengolah seluruh sampah yang berada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan wawancara dengan Arina Waliyati, Ketua Pengelola TPS3R Lohjinawi Borobudur pada tanggal 6 Desember 2022, menyampaikan bahwasanya TPS3R belum dapat mengolah sampah secara maksimal. Hal ini dikarenakan pengolahan sampah terkendala oleh keterbatasan karyawan, beberapa mesin rusak, dan anggaran yang tidak mencukupi. Pengolahan sampah di TPS3R dan Bank Sampah yang belum maksimal mengakibatkan beban sampah di TPA sulit berkurang. Dari aspek pembiayaan, tarif retribusi layanan persampahan terendah di Kabupaten Magelang yakni sebesar sebesar Rp 2.500 bagi bangunan rumah dengan luas s/d 36 m<sup>2</sup>. Meskipun murah, dalam kenyataannya masih ditemukan masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang disebutkan bahwa realisasi anggaran untuk sektor persampahan di Kabupaten Magelang sebesar Rp. 10.534.426.970, sedangkan jumlah penerimaan retribusi hanya sebesar Rp. 198.379.000. Hal demikian mengakibatkan anggaran dana untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang tidak mencukupi karena sampah kian bertambah namun biaya pengelolaan yang dibutuhkan sangat besar dengan anggaran dana yang masih sangat terbatas.

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk melaksanakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan masih mengalami banyak kendala. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dituntut untuk melakukan perubahan strategi dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang. Manajemen strategis diperlukan sebagai bentuk meninjau ulang serta memperbaiki strategi agar menyesuaikan lingkungan strategis. Manajemen strategis dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan terkait keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mendukung pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi (Yusuf, 2019). Adanya manajemen strategis dapat menunjang fungsi kontrol sehingga seluruh proses pencapaian tujuan dan penerapan visi misi berlangsung secara terkendali. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang yang dilihat dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Manajemen Strategis Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang”. Harapannya penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai manajemen strategis pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang tepat sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan optimal.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran terkait bagaimana manajemen strategis pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Tempat penelitian yakni di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Letnan Tukiyat, Gunungan, Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2023. Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Informan yang dipilih yakni yang dianggap relevan untuk memberikan informasi terkait dengan manajemen strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Daftar informan penelitian yakni sebagai berikut.

1. Bapak Immanuel Adie Kurnia, S.T. selaku kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang;
2. Ibu Riani Rahmawati S.T. selaku pegawai Bidang Pengelolaan Sampah dan Penghargaan Lingkungan Hidup (BPSPLH);
3. Bapak Saevul selaku Petugas DLH Lapangan (Koordinator TPA)
4. Ibu Yayuk Puji selaku ketua Komunitas Peduli Lingkungan Pucang Rahayu Kabupaten Magelang dan Bank Sampah Pucang Rahayu;
5. Ibu Arina Waliyati selaku ketua TPS3R Lohjinawi Borobudur;
6. Ibu Novi Susanti selaku Pengurus Paguyuban Pemulung/ Pengepul;
7. Ibu Titin Nasrofah selaku masyarakat yang tinggal sekitar TPA.

Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder dari sumber tertulis, buku, jurnal, arsip, dokumen, dan foto. Sementara itu, instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dengan dibantu berbagai alat dan dokumen-dokumen lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber yakni untuk membandingkan hasil data wawancara dari beberapa informan. Dalam pelaksanaannya, peneliti melaksanakan penggalian data bersama dengan tujuh informan yang selanjutnya peneliti bandingkan dari hasil wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model*) oleh Miles and Huberman. Miles dan Huberman (2014) menjelaskan bahwa aktivitas tersebut adalah kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Tahap ini diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai salah satu instansi pemerintah yang berperan dalam menjaga lingkungan hidup termasuk salah satunya mengenai persoalan sampah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja atau mutu manajemen strategis pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dapat berkelanjutan dan berjalan dengan optimal. Untuk mempermudah dalam memaparkan pembahasan yang didasarkan pada temuan di lapangan, maka peneliti akan menjelaskan data berdasarkan indikator-indikator manajemen strategis menurut Wheelen dan Hunger (2012) antara lain sebagai berikut:

#### **3.1. Pengamatan Lingkungan**

Analisis pengamatan lingkungan menjadi indikator awal dari tahapan manajemen strategis. Organisasi melakukan pengamatan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan perumusan strategi. Dalam rangka menyusun strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang melakukan pengamatan lingkungan berupa analisis SWOT. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal mengenai analisis SWOT tersebut, pada faktor kekuatan Dinas Lingkungan Hidup terletak pada adanya tatanan hukum. Tatanan hukum tersebut terdiri dari tupoksi masing-masing bidang, yakni dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah baik dari tingkat UU hingga peraturan bupati. Selain itu, kekuatan lain berupa sudah adanya pegawai yang kompeten dalam analisis dampak lingkungan, tersedianya instruksi Bupati tentang Bank Sampah, Sekolah Adiwiyata dan Program Kampung Iklim, dan terakreditasinya laboratorium lingkungan Kemudian pada faktor kelemahan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kendala yang berasal dari internal organisasi yaitu kurangnya baik kualitas maupun kuantitas SDM yang dimiliki Dinas Lingkungan



Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang masih belum mencukupi.

Sementara itu, pada faktor peluang Dinas Lingkungan Hidup yakni adanya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan adanya sinergitas serta dukungan baik dari instansi pemerintah, pelaku usaha/swasta, LSM, dan masyarakat. Akan tetapi pada faktor ancaman Dinas Lingkungan Hidup mengalami hambatan berupa kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih kurang yakni sebagian masyarakat masih sulit untuk memilah dan membuang sampah di sungai serta membakar sampah. Selain itu, manajemen pengelolaan TPS3R masih belum optimal dikarenakan masih mengalami kendala dalam aspek karyawan, sarana prasarana, maupun anggaran dana. Hambatan lain yakni TPA yang sudah *overload* dan menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar, serta terdapat pengelolaan sampah yang beresiko menurunnya degradasi kualitas lingkungan. Selanjutnya, faktor meningkatnya penduduk juga menjadi ancaman bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Penduduk di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Bertambahnya tingkat konsumsi penduduk dengan tidak disertai wawasan tentang pengelolaan sampah turut menjadi ancaman bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pengamatan lingkungan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, selanjutnya peneliti dapat mengemukakan hasil analisis matriks SWOT. Matriks Swot ini digunakan untuk menghasilkan strategi mana yang dapat ditempuh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah peneliti lakukan maka dapat mengetahui apakah perumusan strategi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan pengamatan lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang.

Tabel 2. Matriks SWOT Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang

Matriks SWOT Pengelolaan Sampah dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang	
Strategi S-O	Strategi S-T
a) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. b) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. c) Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah; d) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.	a) Penyusunan dan pelaksanaan norma, Penguatan pelaksanaan peraturan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat terutama pada pengurangan sampah. b) Meningkatkan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) secara formal dan informal. c) Mengembangkan kegiatan TPS3R, Bank Sampah, dan Rumah Kompos berbasis masyarakat.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui kegiatan budaya lokal.</li> <li>e) Sosialisasi isu persampahan melalui materi keagamaan, pendidikan dan kegiatan sosial.</li> </ul>
Strategi W-O	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kerjasama dan penerapan skema investasi pengelolaan sampah.</li> <li>b) Memaksimalkan peran pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya pengelolaan sampah.</li> <li>c) Mendorong peran desa dalam pendanaan upaya pengurangan sampah di desa masing-masing.</li> <li>d) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam upaya pengelolaan sampah.</li> <li>e) Meningkatkan peran swasta dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk pengurangan sampah.</li> <li>f) Melaksanakan kajian biaya investasi, operasional dan pemeliharaan upaya pengelolaan sampah.</li> <li>g) Peningkatan kemauan membayar dari masyarakat untuk jasa pelayanan persampahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dinas Peningkatan kompetensi dan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang..</li> <li>b) Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.</li> <li>c) Perubahan pola pikir dan perilaku pegawai dalam pengelolaan sampah.</li> <li>d) Sosialisasi dan advokasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.</li> </ul>

Dengan demikian peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pengamatan lingkungan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup berjalan optimal. Menurut Wheelen dan Hunger (2012), strategi akan berjalan secara efektif apabila organisasi memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Namun tampaknya proses pengamatan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup masih menemui kelemahan dan ancaman yang cukup banyak dibandingkan dengan kekuatan dan peluang. Selanjutnya, adanya proses pengamatan lingkungan ini maka terdapat output yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup yaitu dapat menghasilkan perencanaan strategi dengan membuat analisis pengamatan lingkungan dan hasil evaluasi kinerja program pada tahun sebelumnya.

### 3.2. Perumusan Strategi

Perumusan atau formulasi merupakan indikator kedua dalam membuat manajemen strategi yang akan digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang mengupayakan pembangunan berkelanjutan. Pada tahap perumusan atau formulasi ini, Dinas Lingkungan Hidup harus menentukan beberapa alternatif strategi guna memilih strategi yang handal, yang disesuaikan dengan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi yang sudah

ditemukan pada tahap awal. Dalam perumusan strategi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang melakukan penentuan visi dan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam penentuan visi misi Dinas Lingkungan Hidup dengan melihat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, berpedoman pada visi misi dan program Bupati, renstra kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa tengah, menelaah rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis dan mempertimbangkan keadilan menggunakan analisa gender. Adapun tujuan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yakni mewujudkan pengurangan sampah melalui peningkatan peran serta masyarakat dan meningkatkan cakupan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Selanjutnya cara penyusunan tujuan tersebut yaitu berdasarkan dari visi misi dan mempertimbangkan aspek tertentu.

Langkah selanjutnya yaitu pembuatan strategi. Strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang diantaranya peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menyusun perencanaan dan kajian lingkungan hidup yang baik, penegakan hukum dan penanganan kasus lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat dan/atau individu pengelola lingkungan hidup. Sementara itu, cara membuat dan memutuskan strategi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang mengupayakan pembangunan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal tersebut dilakukan setiap hari dan akan disusun setiap rapat. Selain itu, strategi jangka panjang disusun dalam rapat besar dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan periode 5 tahun.

Terakhir dalam perumusan strategi yaitu penentuan kebijakan. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan di paparkan pada dokumen Renstra dan Jakstrada. Kebijakan yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengurangan dan pengelolaan sampah meliputi pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai untuk selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kegiatan kerja. Kebijakan yang dibuat menyesuaikan sumber daya perangkat daerah, tugas pokok fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Kebijakan disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan sasaran yang akan dicapai. Kondisi awal didasarkan pada akar permasalahan atas isu strategis yang ada.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai perumusan atau formulasi strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perumusan strategi berjalan optimal. Hal ini terjadi dikarenakan penentuan visi dan misi yang berdasar pada visi misi bupati tersusun dengan baik, terukur, realistis, mungkin untuk dicapai, dan relevan dengan tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, penentuan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dengan melihat kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5

(lima) tahunan, sedangkan sasaran menggambarkan tercapainya tujuan berupa pencapaian outcome program. Penentuan tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan visi dan misi sebagaimana hal ini dijelaskan dalam teori Wheelen dan Hunger (2012) bahwa penentuan tujuan dan sasaran di susun guna menghasilkan pemenuhan visi dan misi.

Adapun dalam pembuatan strategi, Dinas Lingkungan Hidup berisi pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai untuk selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian program. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam teori Wheelen dan Hunger (2012) bahwa pembuatan strategi berisikan rumusan perencanaan tentang bagaimana organisasi akan mencapai visi, misi, dan tujuan. Sementara itu, dalam penentuan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kebijakan disusun berdasarkan gap antara kondisi awal dengan sasaran yang akan dicapai. Hal demikian sebagaimana dijelaskan dalam teori Wheelen dan Hunger (2012) bahwa kebijakan merupakan interpretasi dan diimplementasi melalui strategi. Selanjutnya, adanya proses formulasi strategi ini maka terdapat output yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup yakni dapat menentukan strategi mana yang sesuai pada tahun berjalan tersebut, selain itu tingkat keberhasilan pengelolaan sampah dapat berjalan optimal karena permasalahan yang terjadi setiap tahunnya dapat berkurang.

### **3.3. Implementasi Strategi**

Pelaksanaan atau implementasi merupakan indikator ketiga dari manajemen strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Pada tahap ini Dinas Lingkungan Hidup menyusun bagaimana mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan. Kiranya strategi yang telah disusun berjalan dengan baik, perlu membangun struktur untuk mendukung strategi itu dan mengembangkan rencana serta kebijakan yang tepat. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan atau mengimplementasikan manajemen strategi yang telah ditentukan mengacu pada beberapa hal, diantaranya pembuatan program, penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur. Dalam hal pembuatan program, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berdasarkan strategi yang telah disusun. Program tersebut merupakan jabaran dari strategi dan setiap strategi memiliki satu program atau lebih. Selanjutnya, kerjasama dalam penyusunan program tidak hanya sebatas pelibatan aksi kegiatan semata, namun juga kerjasama berupa bantuan dana. Kolaborasi kegiatan dilaksanakan oleh berbagai komponen masyarakat, pelaku usaha, beberapa instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan. Beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus, dan APBD Provinsi melalui Bantuan Gubernur. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti kendaraan operasional angkutan sampah.

Sementara itu, pelaksanaan program pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa program. Program tersebut terbagi menjadi dua yakni program pengurangan sampah dan program penanganan sampah. Program pengurangan sampah terdiri dari Bank Sampah, Sekolah Adiwiyata, dan Gerakan Pungut Sampah. Sementara itu, program penanganan

sampah terdiri dari program TPS3R dan pengadaan alat pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya program-program tersebut memiliki tingkat keberhasilan dan kendala masing-masing. Realisasi program pengurangan sampah tahun 2022 pada program sekolah adiwiyata, bank sampah, TPS3R telah memenuhi target yang telah ditentukan. Program yang mengalami keberhasilan tersebut berdampak pada jumlah pengurangan sampah yang turut memenuhi target. Target pengurangan sampah pada tahun 2022 adalah 150,48 dengan realisasi sebesar 167,6. Sementara itu berikut gambar neraca penanganan sampah Kabupaten Magelang tahun 2022. Secara keseluruhan program pengurangan sampah dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Tabel 3. Neraca Pengurangan Sampah di Kabupaten Magelang

No	Keterangan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
1	2	11	12	13	14
I	Potensi Timbunan Sampah Ton/Hari		667		667
II	Jumlah Pengurangan Sampah		150,48		167,7
	Persentase Pengurangan Dari Sumber		22,58%		25,13%
a	Pembatasan Timbunan Sampah		14,31		28,38
	Sekolah Adiwiyata	47	0,37	61	2
	Sekolah Non Adiwiyata	270	1,08	300	12
	Gerakan Sumber Bersih	12	0,03	12	0,03
	Lubang Cerdas Organik (Biopori)			15	
	Pakan Ayam Dan Ikan	641,367	12,83	717,336	14,35
b	Jumlah Sampah Termanfaatkan Di Sumber Sampah		102,95		70,7
	Bank Sampah Unit	1.000	3	810	8,9
	Bank Sampah Induk	5	0,05	3	2,13
	Pengumpulan Di Lapak	37	92,9	39	58,5
	TPSJR (Anorganik) Dikelola KSM	14	7	3	1,17
	TPST (Anorganik) Dikelola KSM				
c	Jumlah Sampah Didaur Ulang Di Sumber		33,22		68,52
	Bank Sampah Unit (Kompos) Konvenisasi Dan Biopori Tahun 2019	1.000	22	810	1,76
	Bank Sampah Induk (Kompos)	5	0,15	3	0,26
	TPSJR (Kompos) Dikelola KSM	14	7	39	58,5
	PDU Dikelola KSM		0	1	0
	Rumah Kompos Dikelola KSM		0	2	1

No	Keterangan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
	Sekolah Adiwiyata (Kompos)	47	0,47	91	3
	Pengelola Sampah Kawasan	4	3,6	2	4

Dalam hal penanganan sampah, beberapa program belum dapat memenuhi dari target yang telah ditentukan. Program yang tidak maksimal mengakibatkan jumlah penanganan sampah menjadi tidak optimal. Target penanganan sampah pada tahun 2022 adalah 169,37 dengan realisasi sebesar 150,86. Namun baik program pengurangan sampah maupun penanganan sampah yang telah terlaksana tidak menjamin pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang ber kondisi baik. Beberapa program yang terlaksana masih terdapat kendala. Pelaksanaan program pengelolaan sampah terutama pada program penanganan sampah mengalami beberapa kendala berupa pengelolaan TPA yang masih kurang baik di lihat dari metode pengelolaan maupun sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga dalam hal ini pelaksanaan program untuk TPA belum terlaksana. Beberapa program untuk mengatasi TPA yang *overload* yakni pembelian incinerator untuk menyasati kapasitas TPA Pasuruan dan Klegen yang sudah kritis, namun demikian ternyata pengadaan tersebut gagal. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang juga kesulitan untuk mencari lahan baru untuk TPA yang dalam hal ini pencarian lahan baru belum terlaksana. Secara keseluruhan program penanganan sampah dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Tabel 4. Neraca Penanganan Sampah di Kabupaten Magelang

No	Keterangan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
I	Penanganan Sampah		169,37		150,86
II	Jumlah Pengurangan Sampah		169,36		150,86
	Target Persentase Pengurangan Sistem Kota		25,41%		
	Persentase Penanganan Sistem Kota		25,41%		22,62%
A	Pengelolaan		65,06		65,06
	1. Sampah Teroleh Menjadi Bahan Baku		65,06		65,06
	BSU Dikelola Sistem Kota				
	BSI Dikelola Sistem Kota				
	PDU Dikelola Sistem Kota				
	TPS3R Dikelola Sistem Kota	4	3,1	4	3,1
	TPSS Dikelola Sistem Kota	15	30	15	30
	Rumah Kompos Dikelola Sistem Kota	2	3,8	2	3,8
	Lubang Cerdas Skala Kota (Kowen Sapuan Jalan)	90	2,16	90	2,16
	Usaha Daur Ulang Papertech Dll	3	26	3	26
	2. Sampah Termanfaatkan Menjadi Sumber Energi				
B	Pemrosesan TPST		104,3		58,8

No	Keterangan	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022	
		Unit	Ton/Hari	Unit	Ton/Hari
	Sampah yang ditimbun Controlled Landfill	3	80	3	73,8
	- Recover Plastik Oleh Pemulung	3	12	3	12
	- Kompos	3	12,3	3	
III	Sampah yang dikelola (II-III)		319,84		318,46%
	Persentase Sampah Terkelola		47,99%		47,75%
IV	Sampah tidak dikelola (I-IV)		347		348,54
	Persentase Sampah Tidak Terkelola		52,01%		52,25%

Selanjutnya, Program Gerakan Pungut Sampah belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat. Penduduk di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun wawasan dalam pengelolaan sampah masih kurang dan minat masyarakat yang masih rendah tentang sampah. Sementara itu, manajemen Bank Sampah dan TPS3R yang dikelola KSM masih banyak menemui kendala. Kendala tersebut berupa kurangnya anggaran dana, kurangnya pegawai dikarenakan minat masyarakat yang rendah, serta mesin pengelolaan sampah yang rusak. Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator dan pembina masih kurang dikarenakan tidak meratanya dalam memberikan fasilitas dan pelatihan terhadap seluruh Bank Sampah dan TPS3R di Kabupaten Magelang. Dilihat dari kondisi yang ada, implementasi program terlaksana baik namun masih memiliki kendala atau kekurangan.

Adapun dalam hal penyusunan anggaran, anggaran pengelolaan sampah diambil dari dana APBD dan APBN (Dana Alokasi Khusus). Dana anggaran pengelolaan sampah diambil dari dana APBD dan APBN (Dana Alokasi Khusus). Meskipun anggaran APBD didominasi untuk pengeluaran pengelolaan sampah, namun anggaran yang telah dikeluarkan belum dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Sementara itu, pendapatan dari retribusi pengelolaan sampah tidak mencapai 50% dari pengeluaran untuk pengelolaan sampah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang disebutkan bahwa realisasi anggaran untuk sektor persampahan di Kabupaten Magelang sebesar Rp. 10.534.426.970, sedangkan jumlah penerimaan retribusi hanya sebesar Rp. 198.379.000. Dengan demikian pendapatan retribusi sampah yang tidak seimbang dengan realisasi anggaran pengelolaan sampah mengakibatkan keterbatasan anggaran dana dalam pelaksanaan program yang telah disusun. Anggaran yang tidak mencukupi tersebut berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yakni menggunakan metode *sanitary landfill*, namun kenyataan yang berada di TPA Pasuruhan hanya menerapkan metode *open dumping*. Selain itu, kolam pengelolaan limbah sampah masih tidak terkonduksi dengan baik. Dengan demikian, realisasi anggaran yang belum mencukupi mengakibatkan pengadaan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan belum maksimal. Selain pengelolaan sampah di TPA, anggaran

dana yang kurang turut dirasakan di TPS3R. Pihak TPS3R mengalami kendala seperti beberapa mesin mati dan tidak mampu untuk memperbaiki atau membeli dikarenakan tidak adanya dana.

Hal lain dalam indikator implementasi ini ialah pembuatan prosedur. SOP Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang tersebut ada yang sudah bersifat tertulis namun juga ada yang masih dalam proses pembuatan. SOP tersebut akan terus mengalami perbaikan sehingga kedepannya dapat menjadi SOP yang ideal. Selain itu, pegawai dalam melaksanakan SOP tersebut sudah berusaha sebaik mungkin, namun bukan berarti tidak melakukan kesalahan. Dengan demikian, salah satu yang menjadi kendala dalam melaksanakan SOP tersebut adalah karena faktor *human error*.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai pelaksanaan atau implementasi strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dapat dikatakan optimal, akan tetapi masih menemui kendala di karenakan masih ditemukan beberapa permasalahan dalam setiap pelaksanaan implementasi strateginya. Dalam pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup sudah baik namun program masih menemui kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam hal penganggaran, Dinas Lingkungan Hidup mengalami perbedaan anggaran dan realisasi. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah terealisasi 91,29%. Salah satunya penyebabnya karena pengadaan incinerator sampah yang gagal pelaksanaan akibat penyedia barang gagal melaksanakan pekerjaan. Anggaran bukan hanya sebuah perencanaan yang detail dari sebuah implementasi strategi baru, tetapi juga merinci performa laporan keuangan yang diharapkan dapat berefek pada kinerja keuangan untuk masa yang akan datang. Anggaran dalam suatu kegiatan pembangunan dalam hal ini berkaitan dengan masalah pengurangan dan penanganan sampah sangat penting untuk di perhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penganggaran untuk proses pengelolaan sampah di lapangan yang terjadi masih kurang dengan melihat kondisi yang ada.

Selanjutnya, dalam hal prosedur Dinas Lingkungan Hidup beberapa masih dalam tahap pembuatan dimana masih terdapat SOP yang belum tersusun dalam dokumen. Sementara itu, dalam pelaksanaan SOP masih ditemui kendala seperti *human error*. Berdasarkan teori Wheelen dan Hunger (2012), SOP harus tersedia secara detail untuk menyelesaikan setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian, apabila SOP yang tersedia pun masih dalam proses pembuatan tentunya hal ini dapat mempengaruhi dari pelaksanaan program itu sendiri. Selanjutnya, adanya proses implementasi strategi ini maka terdapat output yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup yakni dapat melaksanakan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana strategi dan standar kinerja program yang dibuat.

### **3.4. Evaluasi dan Pengawasan**

Evaluasi merupakan indikator terakhir dalam tahapan manajemen strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup di mana dalam evaluasi ini melakukan umpan balik (*feed back*) untuk memastikan apakah strategi berjalan sesuai dengan rencana yang telah



ditetapkan, seberapa jauh pelaksanaan strategi itu mencapai tujuan. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah strategi itu berjalan dengan baik atau banyak terjadi kesenjangan atau penyimpangan. Pada tahap evaluasi ini Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada beberapa hal yaitu mekanisme evaluasi, pihak yang terlibat dalam evaluasi, bentuk dari evaluasi tersebut, dan indikator/capaian kinerja.

Pada acuan awal yaitu mekanisme evaluasi diadakan rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang. Evaluasi tersebut salah satunya mengenai penganggaran dana. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring/pemantauan salah satunya dengan turun lapangan melihat kondisi pengelolaan sampah. Dalam melakukan evaluasi, Dinas Lingkungan Hidup melibatkan seluruh pegawai baik UPTD Pengelolaan Sampah, bidang pengelolaan sampah, maupun pihak terkait seperti mandor TPA. Sementara itu, bentuk evaluasi berupa LPJ yang disertai dokumentasi lapangan sedangkan hasil evaluasi berupa dokumen LKjIP yang disusun setiap tahun sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja DLH dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Berdasarkan penjabaran di atas mengenai evaluasi strategi pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dapat dikatakan berjalan optimal. Hal ini terjadi karena mekanisme evaluasi dilaksanakan setiap hari dan dirapatkan tiap seminggu sekali dengan melibatkan seluruh pegawai serta hasil dari evaluasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Adanya evaluasi tersebut membuktikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan lokasi kelemahan dalam mengimplementasikan perencanaan strategi dan menstimulasi seluruh proses untuk memulai kembali. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan informasi yang didapatkan untuk membuat perbaikan dan menyelesaikan masalah. Kendati demikian, dalam hal capaian kinerja pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup masih belum mencapai target. Capaian kinerja terhadap 2024 masih rendah yakni 77% dengan kategori rendah. Selanjutnya dengan adanya proses evaluasi strategi ini maka terdapat output yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup yakni dapat melihat hasil dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang berjalan di tahun itu, yakni apakah sesuai dengan strategi yang dibuat, masih adakah permasalahan atau hambatan yang dialami serta dapat melihat tingkat keberhasilan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan lapangan dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proses manajemen strategi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah berjalan optimal akan tetapi masih menemui kendala dalam pelaksanaannya. Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun analisis pengamatan lingkungan sebagai langkah menyusun rencana strategis; menyusun perencanaan, penganggaran, SOP program, melaksanakan strategi melalui program; *me-monitoring* dan melakukan evaluasi. Namun kendala dalam manajemen strategis pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang antara lain ialah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Dinas

Lingkungan Hidup, implementasi program masih terdapat kendala terutama dalam revitalisasi dan pengadaan alat di TPA, TPA yang berkategori *overload* sehingga mendesak untuk dicarikan lahan, penyusunan dan realisasi anggaran yang belum sinkron, SOP yang masih dalam tahap proses pembuatan, pelaksanaan SOP yang masih menemui pelanggaran. Pelaksanaan manajemen strategis pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berdampak pada pengelolaan sampah yang baik, namun implementasi strategi masih menemui kendala sehingga pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang masih dalam tingkat urgensi untuk lebih diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Rekomendasi penelitian yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlunya meningkatkan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi pegawai. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi untuk mengurangi kelemahan dari faktor internal organisasi, sehingga pelaksanaan manajemen strategis dapat berjalan lebih baik. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlunya memperbaiki dan menambah sarana prasarana dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dalam sarana dan prasarana hendaknya memperhatikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yakni dengan menyediakan atau memberikan perbaikan kepada mesin-mesin pengelolaan sampah dari tingkat TPS3R, TPST, hingga TPA. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang harus merealisasikan seluruh program dan kegiatan secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi, terutama pada peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat sehingga pengetahuan dalam melakukan pengurangan dan penanganan pengelolaan sampah secara mandiri dapat ditingkatkan. Keempat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang harus merealisasikan semua anggaran secara optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan, terutama pada pengadaan teknologi ramah lingkungan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan optimal. Kelima, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlunya meningkatkan target kinerja agar sasaran dan tujuan kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dalam pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Keenam, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang memerlukan evaluasi khusus yang terkait beberapa kegiatan pengelolaan sampah dalam upaya pembangunan berkelanjutan agar dapat mengetahui dimana letak kekurangan kegiatan dan mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan.

## Referensi

- [1] Fia Rahmawati, A., Amin, Rasminto, & Dola Syamsu, F. Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Bina Gogik*, Volume 8, Number , 2021, pp.1–12
- [2] Suryani, dkk. *Indikator kesejahteraan, indikator keberlanjutan lingkungan hidup dan implementasinya di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017.
- [3] Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang, Magelang, 2023.
- [4] <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/06/02/ikn-tantangan-kelola-sampah-standar-minimal-harus-berjalan/> diakses Februari 2023.

- [5] Fitriyati. *Responsivitas DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dalam Penanganan Penumpukan Sampah Dan Pencemaran Lingkungan Di TPA Pasuruhan*. Universitas Negeri Tidar Magelang, Magelang, 2021.
- [6] <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/mungkid/2022/03/30/sampah-berserakan-di-pinggir-jalan-raja-sekitar-tpa-pasuruhan/?amp=> diakses Januari 2023.
- [7] Yusuf, Adie Erar dan Karantino SS. *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Diklat*. Universitas Terbuka, Tangerang, 2019.
- [8] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2018.
- [9] Miles, Matthew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Terbaru*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
- [10] Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Periode 2019-2024;
- [11] Wheelen, Thomas L dan J. David Hunger. *Strategic Management and Business Policy, 13 ed*. Prentice Hall, United States of America, 2012.
- [12] Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
- [13] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- [14] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
- [15] Laporan Pertanggungjawaban (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2022.